



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONY OKTAVIAN HARYANTO
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG INOVASI
3. NHK : 899231

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 13.604.779.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/200 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/350 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.850.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.037.715.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 617.064.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 350.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.015.557.567

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 15.970.336.567

III. HUTANG

Rp. 5.216.133.559

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.754.203.008

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.